



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd.**
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua, *q*

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.



Majalengka, Januari 2022

Pihak Pertama,

Drs. H. NASRUDIN, M.M.Pd.
NIP. 19680204 199903 1 002

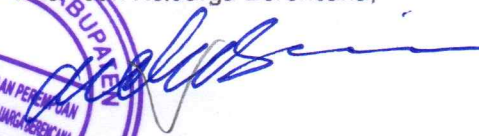
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,1 %
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	20 %
		Persentase anggota perempuan pada organisasi kemasyarakatan	1,45 %
2.	Meningkatnya kesejahteraan perempuan kepala keluarga miskin	Persentase Perempuan Kepala Keluarga Miskin yang Menjadi Mandiri	0,7 %
3.	Meningkatnya implementasi pemenuhan hak-hak anak;	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	600 Nilai
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perlindungan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	0,00015 %
5.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perlindungan terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,0041 %
6.	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	31,11 %
7.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja perangkat daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai
		Capaian SKM Perangkat Daerah	B Nilai
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	100 %
8.	Mengendalikan jumlah anak yang dilahirkan dalam satu keluarga	TFR (Total Fertility Rate)	2,26 Poin
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	79,97 %

Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 325.000.000,00	APBD
2.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp 125.000.000,00	APBD
3.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp 4.625.000.000,00	APBD
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 100.000.000,00	APBD
5.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp 125.000.000,00	APBD
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 6.053.170.000,00	APBD
7.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4.511.452.100,00	APBD
8.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 269.799.800,00	APBD
9.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 8.943.427.300,00	APBD
JUMLAH		Rp 25.077.849.200,00	

Bupati Majalengka, 
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Januari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,

Dr. H. NASRUDIN, M.M.Pd.
NIP. 19680204 199903 1 002